

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum, Jakarta: PT. Gunung Agung Tbk, 2015, hlm 38.
- Burhan Ashshofa. Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 20.
- Ifan Noor Adham. Hukum Agraria: Pengantar Hukum Bagi Hasil Perikanan di Indonesia, Jakarta: Tatanusa, 2011, hlm 2.
- Khudzaifah Dimiyati dan Faisal Riza. Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan, Jakarta: PT Sofmadia, 2013, hlm 8.
- P. Joko Subagyo. Hukum Laut Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013, hlm 1.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1999, hlm 338.
- Ramlan. Tata Kelola Perikanan: Perlindungan Hukum Industry Perikanan dan Penanaman Modal Asing di Indonesia, Malang: Setara Press, 2015, hlm 6.
- Sjahdeini, S. R. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian, Jakarta: Penerbit Alumni, 1993.
- Subekti, R. Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Supriadi dan Alimuddin. Hukum Perikanan Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sutrisno, B. Struktur Sosial dan Ekonomi Nelayan Tradisional, Jakarta: Rajawali Pers.
- Uhammad Karim. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan, Yogyakarta: Spektrum Nusantara, 2017, hlm 108.
- Zarmawis Ismail. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Wilayah Pesisir Indonesia, Jakarta: IPSK-LIPI, 2000, hlm 196.

B. Jurnal/Skripsi

- Chandra Argawansyah. Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Pemilik dan Nelayan Penggarap dalam Hal Perjanjian Bagi Hasil (Studi Masyarakat Nelayan Kota Sibolga). Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Desy Afrita. Sikap Induk Semang Komunitas Nelayan Kota Bengkulu, Jurnal Professional FIS UNIVED, Vol. 4 No. 1, Juni 2017.
- Endang Retnowati. Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2011.
- Hidup Iko, SH. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Lestari, P., & Suharto, D. (2020). Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa di Sektor Perikanan. Jurnal Hukum dan Pembangunan,

15(3), 210- 225.

- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 3, hlm. 281–292.
- Nasution, M. (2019). Perlindungan Hukum bagi Nelayan Penggarap. Jurnal Hukum dan Keadilan, 8(1), 58-67.
- Putra, D. S., Sari, Y. N., & Kurniawan, R. (2018). Konflik Sosial Nelayan dan Solusi Penyelesaian. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 9(2), 134-142.
- Shinta Septina. Mata Pencarian Nelayan Dan Pengolah Ikan, Jurnal PNS SUPM Nengri Tegal, 2018.
- Tarigan, R. (2021). Perlindungan Hukum bagi Nelayan dalam Sistem Bagi Hasil. Jurnal Hukum dan Aktualisasi, 10(1), 56-63.
- Wanda Putri Utami. *Implementasi Undang-Undang No 16 Tahun 1964 Tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan: Praktek Sistem Bagi Hasil Perikanan di PPI Muara Angke*. Skripsi Institut Pertanian Bogor, 2014.
- Wijaya, A. (2020). Kemitraan dalam Perikanan Berbasis Masyarakat. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan, 11(2), 85-96.

C. Website

- Chairiza. Penyelesaian Sengketa. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa, diakses Rabu, 13 November 2024, pukul 20.00 WIB.
- Mukhtar. Istilah Definisi dan Klasifikasi Nelayan. <http://mukhtarapi.blogspot.com/2014/09/istilah-definisi-dan-klasifikasi-nelayan.html>, diakses Senin, 13 November 2024, pukul 20.20 WIB.

D. Hasil Wawancara

- Hasil wawancara dengan Bapak Budi, pada Minggu tanggal 17 November 2024, pukul 11.00 WIB.
- Hasil wawancara dengan beberapa Pemilik Kapal, pada tanggal 26-28 November 2024.
- Hasil wawancara dengan Budi, Pemilik kapal, Angga, dan Minar Nelayan Penggarap, Tanggal 13 Juni 2019, Jam 10.00 WIB.
- Hasil wawancara dengan Budi, Tanggal 20 Juni 2019, Jam 10.00 WIB.
- Hasil wawancara dengan Kasman Winahyu, S.H Kepala bidang Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 18 Juli 2025.
- Hasil wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan pada Hari Kamis, 17 Juli 2025.

E. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 16 Tahun 1964 (huruf a dan pasal 1 huruf b)
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan,
Pembudi Daga Ikan, Dan Pertambak Garam
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengatur perubahan atas
Undang
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

L

A

M

P

I

R

A

N

Wawancara Dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan



Wawancara Dengan Pemilik Kapal

